

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun sektor tersier. Sedangkan arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mencapai hakekat dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembangaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sukirno, 1996 : 33).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka memperlihatkan kemajuan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan atau pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik (Kuncoro, 2004).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas tersebut di atas, atau prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta

mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pada saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di samping sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di daerahnya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan PAD merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 yaitu, Daerah Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Upaya dalam peningkatan pendapatan oleh setiap pemerintah daerah pada level maupun baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota haruslah didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang ditambah dengan seiringnya pembangunan jembatan surmadu harapannya dapat memberikan efek yang baik terhadap perekonomian di Kabupaten Bangkalan. Dalam Tabel 1.1

terlihat penerimaan PAD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2012 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PAD
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012**

No	Uraian	Tahun 2012
		Realisasi
	PENDAPATAN DAERAH	1.176.010.289.333
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.253.709.499,06
1.	PAJAK DAERAH	14.906.524.548,50
2.	RETRIBUSI DAERAH	22.838.667.099,00
	a. Retribusi pelayanan persampahan	158.352.900,00
	b. Retribusi penggantian biaya KTP/ Akte Capil	1.197.126.000,00
	c. Retribusi pelayanan pemakaman	500.000,00
	d. Retribusi parkir di tepi jalan	130.982.000,00
	e. Retribusi Pelayanan Pasar	3.747.528.360,00
	f. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	401.376.000,00
	g. Retribusi alat pemadaman kebakaran	5.405.000,00
	h. Retribusi biaya cetak peta	86.287.500,00
	i. Retribusi pelayanan ketatausahaan	
	j. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang	
	k. Retribusi pelayanan pendidikan	
	l. Retribusi penguasaan menara telekomunikasi	3.910.500,00
	n. Retribusi pelayanan kesehatan	14.566.649.710,00
	o. Retribusi jasa usaha pemakaian kekeayaan daerah	290.406.000,00
	p. Retribusi tempat pelelangan ikan	24.820.000,00
	q. Retribusi terminal	288.077.000,00
	r. Retribusi tempat khusus parkir	575.603.000,00
	s. Retribusi rumah potong hewan	374.196.000,00
	t. Retribusi pelayanan pelabuhan	231.190.000,00
	u. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	177.455.000,00
	v. Retribusi penjualan produksi usaha daerah	16.931.600,00
		22.118.443.670,00
3.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.858.634.538,45
4.	lain-lain PAD yang sah	40.649.883.313,11

Sumber : badan pengelola keuangan dan aset Kabupaten Bangkalan tahun 2013

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2012 di atas, memperlihatkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup besar setelah lain-lain PAD yang sah.

Sumbangan retribusi daerah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 22.838.667.009,00 terhadap PAD. Permasalahan umum yang sering ditemukan dalam pengelolaan retribusi daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil obyek retribusi yang dimilikinya. Seharusnya upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi didasarkan pada potensi yang realistis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi riil dari faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi tersebut, salah satunya retribusi pasar.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusi Retribusi
Pasar Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Bangkalan Tahun 2012

No	Nama Pasar	Target	Realisasi	Capaian
1	Socah	78.000.000	80.420.000	3,10
2	Blega	441.226.650	414.203.900	-6,12
3	Tanah merah	716.423.000	747.448.500	4,33
4	Kedungdung	231.579.000	215.621.500	-6,89
5	Modung	56.306.000	57.478.350	2,08
6	Langkap	134.125.000	137.331.500	2,39
7	Duwa' buter	59.149.000	57.706.500	-2,44
8	Arosbaya	229.194.000	221.579.000	-3,32
9	Sepulu	288.850.000	300.106.000	3,90
10	Klampus	99.170.000	103.079.000	3,94
11	Lomaer	30.124.000	30.948.500	2,74
12	ki. Lemah duwur	908.547.000	1.017.577.000	12,00
13	Kwanyar	179.939.000	193.277.600	7,41
14	Tona'an	29.830.000	29.959.000	0,43
15	Campor	33.900.000	34.267.375	1,08
16	Labang	93.965.000	93.980.200	0,02
17	Sukolilo	37.660.000	38.031.000	0,99
18	Patemon	65.893.000	72.067.000	9,37
19	Jaddih	17.350.000	17.726.750	2,17
20	Tanjung bumi	210.742.000	199.848.500	-5,17
21	Kamal	79.000.000	84.041.000	6,38
22	Seninan	33.744.000	33.797.000	0,16
23	Dupok	91.061.000	91.405.000	0,38
24	Kombangan	20.000.000	20.614.000	3,07
25	Galis	77.900.000	78.042.000	0,18
26	Durjan	172.612.000	174.546.200	1,12
27	Tragah	25.480.000	25.693.310	0,84
28	Bancaran	47.930.000	48.950.000	2,13
29	Kencur	8.060.000	8.060.000	0,00

Sumber: Kantor Lembaga Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2012 realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa pasar yang tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Capaian yang dimaksud dengan data diatas merupakan hasil tingkat efisiensi kinerja suatu pasar tradisional dalam satu periode. Apabila capaian positif, maka semakin efisien

pasar tradisional tersebut. Namun apabila capaiannya bernilai negatif akan semakin tidak efisien pasar tradisional tersebut.

Berdasarkan tabel diatas, pasar yang memiliki capaian tertinggi adalah pasar Ki. Lemah Duwur dengan nilai capaian sebesar 12,00. Sehingga dapat disimpulkan pasar Ki. Lemah Duwur cukup efisien. Sedangkan pasar yang memiliki capaian terendah adalah pasar Kedungdung dengan nilai capaian -6,89. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar kedungdung masih belum efisien. Berdasarkan tabel diatas pula, terdapat beberapa pasar yang masih belum mencapai target dengan baik. Diantaranya, Pasar Blega, Pasar Kedungdung, Pasar Duwa' Buter, Pasar Arosbaya, dan Terakhir Pasar Tanjung Bumi. Hal ini, mengindikasikan adanya suatu permasalahan di dalam kinerja penerimaan retribusi pasar tersebut. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan penerimaan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya semakin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi retribusi pasar agar mampu melampaui nilai target retribusinya.

Pada tabel 1.1 realisasi penerimaan PAD daerah Kabupaten Bangkalan dapat di simpulkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi besar

terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2012 sebesar Rp 22.838.667.009,00. Sedangkan kontribusi dari retribusi daerah ini salah satunya didukung dari pendapatan retribusi pelayanan pasar sebesar 3.747.528.360,00 dengan capaian nilai tertinggi kedua setelah retribusi pelayanan kesehatan.

Namun dari pada itu melihat suatu kondisi dimana pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa terdapat beberapa pasar yang masih belum mencapai target realisasi, hal ini mengidentifikasi bahwa hasil retribusi pelayanan pasar tidak selamanya memberikan hasil yang lebih rendah. Oleh karena itu, Nilai retribusi pasar dapat memberikan hasil yang sangat signifikan terhadap retribusi daerah manakala dari seluruh komponen pasar tradisional yang terdapat di daerah Kabupaten Bangkalan dapat mencapai target realisasi dengan sangat besar. Pasar tradisional sebanyak 29 pasar yang terdapat di kabupaten Bangkalan dapat menjadi efisien dalam mencapai target realisasinya manakala seluruh elemen yang mempengaruhi dari penerimaan retribusi tersebut dapat berjalan se-efektif mungkin.

Maka daripada itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai penerimaan retribusi pasar tradisional tersebut. Sehingga penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan agar dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di kabupaten Bangkalan yang nantinya dari 29 pasar di antaranya yaitu: Pasar Socah, Pasar Blega, Pasar Tanah Merah, Pasar Kedungdung, Pasar Modung, Pasar Langkap, Pasar Duwa' Buter, Pasar Arosbaya, Pasar Sepulu, Pasar Klampis, Pasar Lomaer, Pasar Ki Lemah Duwur, Pasar Kwanyar, Pasar Tona'an, Pasar Campor, Pasar Labang, Pasar Sukolilo, Pasar Patemon, Pasar Jaddih, Pasar Tanjung Bumi, Pasar Kamal, Pasar Senian,

Pasar Dupok, Pasar Kombangan, Pasar Galis, Pasar Durjan, Pasar Tragah, Pasar Bancaran, dan Pasar Kencur dapat mencapai hasil yang sangat signifikan dalam target dan realisasinya serta dapat memberikan kontribusi besar pada retribusi pasar, retribusi daerah, serta dapat menambah dari hasil pendapatan asli daerahnya.

Melihat dari pembahasan sebelumnya bahwa jumlah retribusi pasar dapat mengalami peningkatan manakala dari 29 pasar yang terdapat di Kabupaten Bangkalan dapat mencapai target dan realisasinya dengan baik, manakala seluruh elemen atau faktor-faktor yang mempengaruhi dapat di benahi dengan baik. sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah :

1.4.1. Bagi Penulis

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi Retribusi Daerah di Kabupaten Bangkalan, khususnya Retribusi Pasar.

1.4.2. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bangkalan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bangkalan.

1.4.3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.